

**PEMAHAMAN POLITIK ISLAM
STUDI TENTANG WAWASAN PENGURUS DAN SIMPATISAN
PARTAI POLITIK BERASAS ISLAM DI MALANG RAYA**

*Political Understanding Islam Study on the Management Insights and Investigators
Political Parties berasas Islam in Malang*

Ishomuddin

Pascasarjana, Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang
Email: ishom_umm@yahoo.com

ABSTRACT

In the Islamic discourse there is a difference between politics and political Islam. The word politics is always associated with the concepts and the order of life rooted in the scientific community and the Western tradition. While the term political Islam is a typical term that refers to the Islamic concepts, especially the terms that appear in the time of Prophet Muhammad and his followers. Islamic political practices referred to in the ways of the Prophet Muhammad and the periods subsequent to the period of the first four caliphs and later periods, modern and contemporary. After doing research, the results are as follows; Political Islam is to promote and uphold the teachings of Islam. Islam may not be implemented properly if not through a mass movement in the form of a political party. Muslims also actually directly or not is to implement political in the broadest sense. So political Islam that is done behaviors aimed at improving the people, in this case Muslims. Islam is not separated from the teachings set of human social life. Without partisan we may not be able to fight for Muslims to acquire rights in life which is plural. Stated that political Islam is true is that how we can implement the teachings of Islam in accordance with the conditions and contexts that exist today. Political Islam is a strategy to implement the Islamic da'wah right and on the intended target. Political Islam is a government based on Islam itself as ever fought by the Prophet that the State Medina. Islamic Propagation may not be implemented optimally if not using political means.

Keywords: *political party , political Islam*

ABSTRAK

Di dalam wacana keislaman terdapat perbedaan antara politik dan politik Islam. Kata politik selalu dihubungkan dengan konsep-konsep dan tatanan kehidupan masyarakat yang berakar pada keilmuan dan tradisi Barat. Sedangkan istilah politik Islam adalah suatu istilah khas yang merujuk pada konsep-konsep Islam terutama istilah-istilah yang muncul pada masa Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Praktek politik Islam dirujuk pada cara-cara bagaimana Nabi Muhammad dan periode-periode setelahnya yakni pada periode Khulafaur Rasyidin dan periode-periode berikutnya, modern dan kontemporer. Setelah dilakukan penelitian maka hasilnya adalah sebagai berikut; Politik Islam adalah memperjuangkan dan menegakkan ajaran-ajaran Islam. Tidak mungkin Islam dapat dilaksanakan dengan baik jika tidak melalui gerakan massa berupa partai politik. Beragama Islam juga sebenarnya secara langsung atau tidak adalah melaksanakan politik dalam arti luas. Jadi politik Islam itu adalah perilaku-perilaku yang dilakukan bertujuan memperbaiki umat, dalam hal ini adalah umat Islam. Islam sesungguhnya tidak terlepas dari ajaran-ajaran mengatur kehidupan sosial manusia. Tanpa berpartai tidak mungkin kita dapat memperjuangkan umat Islam untuk memperoleh hak-haknya dalam berkehidupan yang plural ini. Dinyatakan bahwa politik Islam itu sesungguhnya adalah bahwa bagaimana kita bisa melaksanakan ajaran- ajaran Islam itu sesuai dengan kondisi dan konteks yang ada sekarang ini. Politik Islam adalah startegi melaksanakan dakwah Islam yang tepat dan mengenai sasaran yang dituju. Politik Islam adalah pemerintahan yang berbasis pada Islam itu sendiri sebagaimana yang pernah diperjuangkan oleh Nabi yaitu Negara Madinah. Dakwah Islam tidak mungkin dapat dilaksanakan secara maksimal jika tidak menggunakan sarana politik.

Kata Kunci : Partai Politik, Politik Islam

PENDAHULUAN.

Di dalam wacana keIslaman terdapat perbedaan antara politik dan politik Islam. Kata politik selalu dihubungkan dengan konsep-konsep dan tatanan kehidupan masyarakat yang berakar pada keilmuan dan tradisi Barat. Sedangkan istilah politik Islam adalah suatu istilah khas yang merujuk pada konsep-konsep Islam terutama istilah-istilah yang muncul pada masa Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Praktek politik Islam dirujuk pada cara-cara bagaimana Nabi Muhammad dan periode-periode setelahnya yangni pada periode Khulafaur Rasyidin.

Namun demikian di dalam perkembangannya terjadi pergeseran-pergeseran pemikiran mengenai apakah terdapat konsep tentang politik Islam atau hanya nilai-nilai Islam yang dipakai dalam menjalankan urusan Negara? Perbincangan semacam ini terjadi di kalangan umat Islam sehingga se-olah-olah dapat dipisahkan antara Islam dan Politik. Perbincangan lama yang kini menghangat kembali adalah *discourse* mengenai apakah ada hubungan antara Islam dan politik. Perbincangan ini menjadi sangat penting karena dikaitkan dengan maraknya diskusi-diskusi mengenai bentuk demokrasi sebuah tipologi bentuk sistem pemerintahan yang dipakai oleh negara-negara Barat di negara Indonesia yang berpenduduk mayoritas beragama Islam.

Perbincangan hubungan Islam dan politik melahirkan aliran-aliran yang saling mengukuhkan pendapatnya masing-masing. Terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan politik. *Aliran pertama* berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran

ini pada umumnya berpendirian bahwa (1) Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik; oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat, (2) Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad dan oleh empat al-Khulafaur Rasyidin.

Aliran kedua, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur; dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara.

Aliran ketiga, menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti memiliki pendapat yang sama dengan aliran yang pertama. Atas dasar itu dalam penelitian ini peneliti memilih konsep atau aliran yang pertama sebagai disamping karena Islam dipahami oleh mayoritas muslim adalah agama yang mengatur segala kehidupan manusia dari berbagai aspeknya, juga mayoritas umat Islam mengenal dan memahami bahwa Nabi Muhammad tidak hanya sekedar seorang ahli agama Islam

yang bertugas mengemban misioner Islam tetapi juga seorang kepala Negara /kepala pemerintahan terutama ketika beliau mendirikan Negara Madinah.

Berangkat dari uraian tersebut di atas, untuk memahami wawasan politik para pengurus partai politik yang berbasis atau berasas Islam, maka perlu dilakukan penelitian sehingga akan diketahui seperti apa pandangan, wawasan, pemahaman Islam dan politik sehingga akan terlihat corak dan idealism mereka dalam berpolitik praktis (*low politics*) untuk memperjuangkan misi partai. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut; (1) Bagaimana pemahaman Islam dan politik bagi pengurus partai politik yang berasas Islam? (2) Dalam bentuk apa sajakah para pengurus mengekspresikan dan mengaspresiasi pemahaman itu di dalam praktek politik kepartaian?

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni menggali data melalui wawancara (*in-depth interview*) kepada para pengurus partai politik berasas Islam. Setelah data-data terkumpul, maka akan dianalisis menggunakan cara deskriptif kualitatif. Dalam kesimpulan penelitian ini akan menghasilkan deskripsi tebal (*thick description*) mengenai pemahaman politik Islam dalam pemahaman para pengurus partai politik dan bagaimana cara mereka menerapkan misi dan pemahaman itu dalam praktek politik di lapangan.

Pengertian Politik dan Politik Islam

Apa itu Politik? Dan kapan istilah ini muncul? Politik dalam pemahaman orang Yunani diartikan sebagai negara kota (*polis*). Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles (384-322 SM). Ia berangkat dari pengamatannya tentang manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik. Dengan itu ia ingin menjelaskan, hakikat kehidupan social sesungguhnya merupakan

politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles melihat hal ini sebagai kecenderungan alami dan tak dapat dihindarkan oleh manusia dan hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkan dirinya dari bekerja sama dengan orang lain.

Pada abad ke-16 sampai awal abad ke-20, politik diartikan secara lebih sempit dibandingkan dengan pengertian yang difahami orang-orang Yunani. Seorang filsuf Politik Perancis, Jean Bodin (1530-1596) memperkenalkan istilah ilmu politik (*science politique*). Tetapi karena ia seorang pengacara, sorotannya mengenai ciri-ciri negara menyebabkan ilmu politik menjadi terkait dengan organisasi dari lembaga yang mempunyai sangkut-paut dengan hukum. Montesquieu (1689-1755), mengemukakan bahwa semua fungsi pemerintahan dapat dimasukkan dalam kategori legislative, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan perspektif ini dapat dipahami bahwa para ahli ilmu politik sampai sekarang ini, memusatkan perhatian, pada organisasi dan sistem kerja lembaga-lembaga yang membuat undang-undang, yang melaksanakannya dan yang menampung pertentangan yang timbul dari kepentingan yang berbeda dan bermacam-macam penafsiran tentang undang-undang.

Apakah ilmu politik benar-benar ilmiah? Atau Seberapa jauh keilmiahan dapat dicapai dalam memahami politik? Tidak satupun ilmu-ilmu social, termasuk ilmu politik, sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi, bisa mencapai status ilmiah yang dinikmati oleh fisika, kimia, geologi, fisiologi, astronomi atau setiap disiplin ilmu alam lainnya. Dengan demikian maka sesungguhnya untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas adalah merupakan persoalan lebih atau kurang.

Kecenderungan kajian politik di masa lampau. Plato (427-347 SM) dipandang sebagai bapak filsafat politik, dan Aristoteles sebagai bapak ilmu politik, sekurang- kurangnya di Barat. Keduanya

memandang negara dari perspektif filosof yang melihat semua pengetahuan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Namun, berbeda dengan Plato, Aristoteles jauh lebih memberikan dukungan atas generalisasi dan preferensi nilainya melalui fakta yang dapat diamati dengan nyata (sebagai pengganti wawasan intuitifnya Plato). Sejarah politik Yunani, menurut Aristoteles, menggambarkan suatu negara yang paling stabil, dan yang paling banyak memberikan fasilitas bagi individu untuk mengembangkan kemampuan rasionalnya, suatu negara yang pemilikan kekayaan telah meluas, dan pada hakekatnya didistribusikan secara merata. Dengan demikian Aristoteles juga telah menunjukkan fakta (kestabilan politik yang sebenarnya) yang relevan dengan preferensi nilainya (khususnya mengenai pengembangan rasional individu).

Jika dianggap bahwa ilmu politik mempelajari politik, maka perlu kiranya dibahas dulu istilah politik itu. Dalam kepustakaan ilmu politik ternyata ada bermacam-macam definisi mengenai politik. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistim itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decisionmaking*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistim politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) dari sumber-sumber dan resources yang ada.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama

maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (*coercion*). Tanpa unsure paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan (*statement of intent*) belaka.

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*). Lagi pula politik menyangkut kegiatan berbagai-bagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan orang-perorang (individu). Perbedaan-perbedaan dalam definisi yang kita jumpai, disebabkan oleh setiap sarjana meneropong hanya satu aspek atau unsure dari politik saja. Unsur itu diperlakukannya sebagai konsep pokok, yang dipakainya untuk melihat unsure-unsur lainnya. Konsep- konsep pokok itu antara lain adalah (1) negara, (2)kekuasaan (*power*), (3) pengambilan keputusan (*decisionmaking*), (4) kebijaksanaan (*policy,beleid*), (5) pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

Dalam perspektif Islam, istilah politik disamakan dengan kata *al-Siasah*. Kata *siasah* berasal dari kata "*sasa*". Kata ini dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisan al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siasah* dapat pula berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan *Al-Maqrizi* menyatakan, arti kata siyasat adalah mengatur. Kata *sasa* sama dengan "*to govern, to lead*. *Siasah* sama dengan *policy (of government, corporation, etc.)*. Jadi *siasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu tujuan adalah *siasah*.

Secara terminologis dalam *Lisan al-Arab*, siasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam *Al-Munjid* disebutkan, siasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan siasah adalah ilmu pengetahuan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya sebagai “undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibnu al-Qayim yang dinukilkannya dari Ibn Aqil menyatakan; “Siasah merupakan suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Pengertian yang singkat dan padat juga dikemukakan oleh Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan siasah adalah “pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan syara .

Pada prinsipnya pengertian-pengertian tersebut di atas mengandung persamaan. *Siasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan. Disamping ada kesamaannya ada pula perbedaannya terutama pada penekanan orientasi. Tiga definisi pertama bersifat umum, yaitu *siasah* yang tidak memperhatikan nilai-nilai syariat agama sekalipun tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan. Corak *siasah* ini dikenal dengan istilah *siyasat wadh'iyat*, yaitu *siasah* yang berdasarkan kepada pengalaman sejarah dan adat masyarakat

serta hasil oleh pemikiran manusia dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Namun tidak semua *siyasat wadh'iyat* ditolak selama ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dan ruh Islam. Sedangkan dua definisi terakhir bersifat khusus, yaitu *siasah* yang berorientasi kepada nilai-nilai kewahyuan atau syariat. Corak *siasah* ini dikenal dengan istilah *Siasah Syar'iyah* atau *Fiqih Siasah* (dua istilah yang berbeda tetapi mempunyai pengertian yang sama), yaitu *siasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat.

Abdul Wahhab Khallaf¹⁾ merumuskan *Fiqih Siasah* adalah;²⁾ pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid Senada dengan itu Abdur Rahman Taj memberikan pengertian; *Siasah Syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash *tafshili dan juz'i* dalam al-Quran dan Sunnah³⁾. Pengertian yang agak luas diberikan oleh Ibn Abidin sebagai berikut; *Siasah Syar'iyah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan di dunia dan akhirat, dan siasah itu dari para nabi secara khusus dan umum baik zahir maupun bathin, dan dari para pemegang kekuasaan, para sulthan dan raja secara zahir serta dari para ulama ahli waris para nabi secara khusus pada bathinnya⁴⁾.

Berdasar atas uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Fiqih Siasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya dalam arti popularnya adalah ilmu tata negara dalam ilmu agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.

Sedangkan ruang lingkup pembahasan *fiqh siyasah* ini mencakup perlu atau tidaknya negara bagi umat manusia ini⁵), syarat-syarat seorang kepala negara, mekanisme pemilihan kepala negara, tugas-tugas kepala negara dan hubungan pemerintah dengan rakyatnya.⁶)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Di dalam penelitian kualitatif yang terpenting adalah data-data yang digali melalui interview mendalam (*in-depth interview*) yakni data-data yang berupa ujaran atau kata-kata dari informan yang terpilih. Dalam penelitian ini informan dipilih secara purposive (*purposive sampling*) yakni dengan menggunakan beberapa criteria sesuai kebutuhan data penelitian ini.

Setelah dilakukan pemetaan obyek penelitian, maka secara purposive dapat ditentukan obyek penelitian ini yaitu tiga partai yang berbasis Islam berdasarkan visi, misi dan tujuan partai yaitu; Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai-partai tersebut menjadi objek dalam penelitian dan para pengurus dan simpatisan masing-masing partai akan dijadikan sebagai informan yang dipilih secara purposive.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah data-data terkumpul maka dilakukan analisis dan disimpulkan dalam bentuk deskriptif berdasarkan data-data emik yang telah diperoleh dari para informan dari ketiga partai tersebut adalah sebagai berikut:

- Politik Islam adalah memperjuangkan dan menegakkan ajaran-ajaran Islam. Tidak mungkin Islam dapat dilaksanakan dengan baik jika tidak melalui gerakan massa berupaka partai politik.
- Beragama Islam juga sebenarnya secara langsung atau tidak adalah melaksanakan politik dalam arti luas. Jadi politik Islam itu adalah perilaku-perilaku yang dilakukan bertujuan memperbaiki umat, dalam hal ini adalah umat Islam.
- Islam sesungguhnya tidak terlepas dari ajaran-ajaran mengatur kehidupan sosial manusia. Tanpa berpartai omong kosong kita dapat memperjuangkan umat Islam untuk memperoleh hak-haknya dalam berkehidupan yang plural ini.
- Bahwa Islam adalah agama yang mengharuskan umatnya melakukan politik dalam pengertian yang luas, yakni mengatur dan mengendalikan umat Islam dalam menjalankan tugas-tugas hidup di tengah-tengah masyarakat lain.
- Dinyatakan bahwa politik Islam itu sesungguhnya adalah bahwa bagaimana kita bisa melaksanakan ajaran-ajaran Islam itu sesuai dengan kondisi dan konteks yang ada sekarang ini. Untuk itu politik Islam adalah ajaran-ajaran Islam itu dilaksanakan secara tepat. Dengan demikian politik Islam itu adalah strategi melaksanakan ajaran-ajaran Islam.
- Politik Islam memiliki pengertian yang sangat luas, tergantung pada perspektif apa yang dipakai untuk mengartikan politik itu sendiri. Politik Islam adalah

- startegi- strategi melaksanakan dakwah Islam yang tepat dan mengenai sasaran yang dituju.
- Politik Islam adalah pemerintahan yang berbasis pada Islam itu sendiri sebagaimana yang pernah diperjuangkan oleh Nabi yaitu Negara Madinah.
 - Dakwah Islam tidak mungkin dapat dilaksanakan secara maksimal jika tidak menggunakan sarana politik. Dengan wadah partai politik Islam dapat menembus elit kekuasaan dan dapat mempengaruhi penyusunan aturan dan kebijakan-kebijakan yang di olah di parlemen. Dengan demikian memperjuangan ajaran-ajaran Islam melalui kekuatan politik untuk merebut kekuasaan sehingga dapat mempengaruhi segala keputusan dan peraturan yang disusun oleh parlemen sehingga mendapatkan manfaat bagi semua kelompok tertama adalah kaum Muslimin. Dengan kata lain politik Islam

kekuasaan untuk mengatur pemerintahan.

- Ajaran Islam itu tidak hanya berkisar pada perosalan-persoalan hukum Islam dan ritual saja melainkan persoalan hidup, seperti keadilan, hak-hak yang harus diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan sebagainya. Jadi, politik Islam adalah apa saja yang dilakukan dalam kerangka untuk mewujudkan ajaran-ajaran Islam kepada manusia. Namun demikian perlu dilakukan cara-cara yang strategis dalam melaksanakan hal itu supaya mendapatkan hasil yang sempurna dan ideal dan satu-satunya cara menurut saya adalah melalui wadah partai politik.

Dari kesimpulan tersebut di atas maka wawasan pengurus dan simpatisan ketiga partai berasas Islam tersebut di atas adalah sebagaimana tergambar pada mapping berikut ini:

Tabel 1. Mapping Analisis Pemahaman dan Wawasan Pengurus dan Simpatisan Partai Berdasarkan Data Penelitian

No	Pemahaman konsep	Pengurus dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Pengurus dan simpatisan Partai Bulan Bintang (PBB)	Pengurus dan simpatisan Partai Persatuan pembangunan (PPP)
1	Pengertian politik Islam	Islam adalah politik	Politik Islam adalah strategi melaksanakan ajaran-ajaran Islam	Politik Islam adalah pemerintahan yang berbasis pada Islam
2	Hubungan antara Islam dan pelaksanaan pemerintahan	Islam adalah memperbaiki dan mengatur kehidupan begitu juga tugas pemerintah	Islam adalah agama dakwah yang harus dilaksanakan secara kontekstual (termasuk melalui politik)	Islam adalah memperbaiki dan mengatur kehidupan begitu juga tugas pemerintah
3	Hubungan Muslim dengan politik kekuasaan	Setiap umat Islam wajib berpolitik praktis	Setiap muslim wajib berpolitik praktis.	Setiap muslim wajib berpolitik, tetapi tidak harus melalui politik praktis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari analisis data yang telah dikemukakan pada bab VI (hasil dan

pembahasan) di atas maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Politik Islam adalah memperjuangkan dan menegakkan ajaran-ajaran Islam.

Tidak mungkin Islam dapat dilaksanakan dengan baik jika tidak melalui gerakan massa berupaka partai politik.

- Beragama Islam juga sebenarnya secara langsung atau tidak adalah melaksanakan politik dalam arti luas. Jadi politik Islam itu adalah perilaku-perilaku yang dilakukan bertujuan memperbaiki umat, dalam hal ini adalah umat Islam.
- Islam sesungguhnya tidak terlepas dari ajaran-ajaran mengatur kehidupan sosial manusia. Tanpa berpartai omong kosong kita dapat memperjuangkan umat Islam untuk memperoleh hak-haknya dalam berkehidupan yang plural ini.
- Bahwa Islam adalah agama yang mengharuskan umatnya melakukan politik dalam pengertian yang luas, yakni mengatur dan mengendalikan umat Islam dalam menjalankan tugas-tugas hidup di tengah-tengah masyarakat lain.
- Dinyatakan bahwa politik Islam itu sesungguhnya adalah bahwa bagaimana kita bisa melaksanakan ajaran-ajaran Islam itu sesuai dengan kondisi dan konteks yang ada sekarang ini. Untuk itu politik Islam adalah ajaran-ajaran Islam itu dilaksanakan secara tepat. Dengan demikian politik Islam itu adalah strategi melaksanakan ajaran-ajaran Islam.
- Politik Islam memiliki pengertian yang sangat luas, tergantung pada perspektif apa yang dipakai untuk mengartikan politik itu sendiri. Politik Islam adalah startegi-strategi melaksanakan dakwah Islam yang tepat dan mengenai sasaran yang dituju.
- Politik Islam adalah pemerintahan yang berbasis pada Islam itu sendiri sebagaimana yang pernah diperjuangkan oleh Nabi yaitu Negara Madinah.
- Dakwah Islam tidak mungkin dapat dilaksanakan secara maksimal jika tidak menggunakan sarana politik. Dengan wadah partai politik Islam dapat menembus elit kekuasaan dan dapat mempengaruhi penyusunan aturan dan kebijakan-kebijakan yang di olah di parlemen. Dengan demikian memperjuangkan ajaran-ajaran Islam melalui kekuatan politik untuk merebut kekuasaan sehingga dapat mempengaruhi segala keputusan dan peraturan yang disusun oleh parlemen sehingga mendapatkan manfaat bagi semua kelompok terutama adalah kaum Muslimin. Dengan kata lain politik Islam kekuasaan untuk mengatur pemerintahan.
- Ajaran Islam itu tidak hanya berkisar pada perosalan-persoalan hukum Islam dan ritual saja melainkan persoalan hidup, seperti keadilan, hak-hak yang harus diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan sebagainya. Jadi, politik Islam adalah apa saja yang dilakukan dalam kerangka untuk mewujudkan ajaran-ajaran Islam kepada manusia. Namun demikian perlu dilakukan cara-cara yang strategis dalam melaksanakan hal itu supaya mendapatkan hasil yang sempurna dan ideal dan satu-satunya cara menurut saya adalah melalui wadah partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Mawardi, Ali bin Muhammad (1973), *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Mesir, Musthafa al Babi al Halabi.
- Basyir, Ahmad Azhar (1993), *Refleksi Atas Persoalan KeIslaman*, Bandung, Mizan.
- Budiardjo, Miriam ((1982), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia.
- Goetz, J.P. & Le Compte, M.D. (1984), *Ethnography and Qualitative Design in Educational Research*, New York, Academy Press Inc.

- Khallaf, Abd. Al-Wahhab (1977), *Al-Siyasat al-Syar iyyat*, Dar al-Anshar al-Qahirat. Pulungan, J. Suyuti (1994), *Fiqh Siasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, LSIK.
- Rodee, Carlton Clymer (Cs) diterjemahkan Zulkifly Hamid (1993), *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Taj, Abdur Rahman (1953), *Al-Siasah al-Syar iyyat wa al-Figh al-Islami*, Dar al-Ta lif, Mesir